

KEBIJAKAN INDONESIA BELUM MENGAKUI KEMERDEKAAN KOSOVO PADA TAHUN 2008

Oleh:

Ressy Mauliani ¹

(eccymauliany93@gmail.com)

Pembimbing : Saiman Pakpahan, S.IP, M.Si

Bibliografi : 3 Jurnal dan/atau Working Papers, 15 Buku, 2 Dokumen dan Laporan Resmi, 2 Tesis, 1 Skripsi 9 Situs Web

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya JL HR. Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The purpose of this research is to understand Indonesia Foreign Policy Has Not Admitted Kosovo Independence In 2008. Kosovo is a province in Serbia, but due to the uprising finally Kosovo secede from Serbia and stands today as a nation that also require confessions from other countries. Most countries chose to recognized and ignore the Kosovo Independence. Differently, Indonesia chose to did not recognize Kosovo Independence in 2008. Thus researcher question is Why Indonesia Foreign Policy Has Not Admitted Kosovo Independence In 2008.

This research theoretically has built with Realism perspectives on International Relations and supported by Foreign Politic theory James N. Rossenau. Formulation of all arguments, facts, and theoretical framework on this research is guided by qualitative explanation methods. Technique in this research is through by the study of library. Data which is gotten and collected through the journal books, the last thesis and then from internet has related to the problems.

Researcher has formulated answered-hypothesis whic reveals the fact that Indonesia actually put themself in the position of "wait and see" to the development of the newly established state. On the basis of the existing separatist movements in Indonesia could trigger a conflict that can lead to the release of such regions of Indonesia and East Timor. For that, in taking the decision to admit other countries, Indonesia is very cautious dala take a decision as this will have a direct impact for Indonesia

Keywords : Foreign Policy, Indonesia, Kosovo, Independence, Separatism, Recognize

¹Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2011

Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan Indonesia belum mengakui kemerdekaan Kosovo sebagai sebuah negara yang berdaulat. Adapun Kosovo sebelumnya merupakan salah satu provinsi di Serbia, namun akibat pemberontakan yang terjadi akhirnya Kosovo melepaskan diri dari Serbia dan berdiri saat ini menjadi sebuah negara yang juga membutuhkan pengakuan-pengakuan dari negara-negara lain.

Kajian ilmu hubungan internasional memiliki lingkup kajian yang lebih luas seiring perkembangan zaman. Seperti halnya 12 pertanyaan yang diajukan Carl Deutsch mengenai; Bangsa dan dunia, proses transnasional dan interdependensi internasional, kekuatan dan kelemahan, politik internasional dan masyarakat internasional, kependudukan versus pangan, SDA dan lingkungan, kebebasan dan penindasan, dan lainnya.² Hal hal inilah yang biasa dijadikan objek penelitian bagi penstudi Hubungan Internasional.

Salah satu perkembangan ilmu dalam ilmu hubungan internasional ialah munculnya isu- isu baru yang harus ditangani oleh dunia Internasional. Seperti halnya konflik etnis atau konflik saudara atau konflik dalam negeri. Seperti halnya studi hubungan internasional didefinisikan sebagai studi hubungan antar negara³. Salah satu perkembangan ilmu dalam ilmu hubungan internasional ialah munculnya isu- isu baru yang menarik untuk dikaji serta diteliti. Pada perkembangannya, studi hubungan internasional diwarnai antara konflik atau kerjasama. Seperti halnya konflik yang terjadi di Kosovo memberikan dampak tersendiri bagi negara Indonesia secara tidak langsung.

² Mochtar Mas' oed. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan ilmu*. 1990, hal 29-30

³ Chris Brown, 2001. *Understanding International Relations*, second edition., New York: Palgrave

Kosovo awalnya merupakan salah satu wilayah yang terletak di bagian selatan Serbia yang merupakan salah satu provinsi Serbia. Mayoritas penduduk Kosovo ialah muslim yang merupakan keturunan dari suku Albanian.⁴ Di Kosovo dahulu etnis Albania merupakan minoritas saat masih dibawah Yugoslavia. Hingga pada akhirnya pada tahun 1386 kerajaan Ottoman yang berpusat di Istanbul Turki menaklukan wilayah Kosovo sehingga berangsur-angsur banyak dari penduduk Kosovo yang semula beragama Kristen Ortodok memeluk Islam.⁵ Seiring dengan berjalannya waktu, etnis Albania banyak yang berpindah ke Kosovo sedangkan etnik Serbia berangsur-angsur beralih ke wilayah Utara Serbia akibat dari tekanan kerajaan Ottoman.⁶

Pecahnya konflik Kosovo dimulai ketika ppada tahun 1981, terjadi pengklaiman oleh Serbia atas resentralisasi wilayah Kosovo. Hingga pada tahun 1989, Kosovo diberi status otomi khusus, namun ketika Serbia dibawah kepemimpinan Sloodan Miloservic status otonomi khusus yang telah diberikan kepada Kosovo diubah, Slobodan Milosevic menghapus staus otonomi sehingga daerah tersebut berada dibawah pengawasan langsung Belgrade yang merupakan ibukota Serbia.⁷

Kelompok etnis Albania Kosovo yang menentang keputusan ini kemudian melakukan perlawanan. Selain itu adanya tuntutan dari penduduk Kosovo yang menginginkan peningkatan status wilayah Kosovo dari provinsi menjadi Republik

⁴ *Albania Bujuk OKI Internasionalisasi Masalah Kosovo*, dalam http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=10977 , diakses pada tanggal 3 Mei 2015 Pukul. 19:07 Wib

⁵ *Latarbelakang Kosovo*, dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123644-PK%20VI%20633.8274-Kemerdekaan%20negara-Pendahuluan.pdf> , diakses pada 03 Mei 2015, Pukul 20:08 Wib

⁶ Sering disebutkan dalam berbagai literatur Ustmaniyah

⁷ Lita Febriani, *Peran Amerika Serikat di Kosovo Pasca Kemerdekaan Kosovo*, Universitas Riau JOM Fisip Volume 01 No.02, Oktober 2014.

semakin membuat etnis Albania secara penuh melakukan perlawanan. Pada tahun 1991 Slovakia dan Kroasia memerdekakan diri yang disusul dengan Intervensi militer tentara federal yang terjadi sangat sengit. Kemudian di tahun 1992 Bosnia juga memproklamkan kemerdekaannya, tentara federal melakukan aksi militer dengan alasan mempertahankan kesatuan negaranya.⁸ Melihat keadaan seperti itu, Kosovo juga ingin melepaskan diri dari Pemerintahan Serbia, ditenggarai oleh etnis Albanian membuat sebuah referendum yang dianggap ilegal oleh Serbia menyatakan pemisahan diri Kosovo baik dari federasi Yugoslavia maupun Republik Serbia, yang kemudian hal ini menjadi pemicu peperangan berlarut-larut di Kosovo. Walaupun Yugoslavia tidak lagi muncul di tahun 1992, Kosovo tetap berada di bawah Serbia hingga masuknya NATO dengan mandat PBB pada 1999. Sejak saat itu, elite politik Kosovo bertekad untuk segera memerdekakan Kosovo dan berpisah dari Serbia.

Pada tahun 1999 tersebut, pecah perang Kosovo yang disebabkan referendum rakyat Kosovo mayoritas menginginkan kemerdekaan dari Serbia, sementara pemerintah Serbia menganggap referendum tersebut ilegal, hingga akhirnya terjadi peperangan yang memuncak di tahun ini antara Etnis Albania dengan pasukan militer Serbia. Tentara Serbia menyerang Kosovo dengan sasaran utama *Kosovo Liberation Army* (KLA) hingga membuat perlawanan dari Kosovo hingga Pemerintahan Serbia menginginkan pembersihan etnis Albania. Atas berita ini masuklah tentara NATO atas mandat PBB sehingga keadaan dapat sedikit tenang.⁹

Pada tahun 2007, Kosovo mengadakan pemilihan umum dan hal ini

di boikot oleh pemerintah Serbia. Setelah itu di tahun 2008 Kosovo melalui dewan parlemennya di Pristina, Kosovo yang merupakan bagian dari wilayah Serbia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Februari 2008 setelah melalui banyak rintangan. Masyarakat Kosovo telah memegang otonomi secara penuh, mereka tidak lagi berada dibawah pemerintahan Serbia. Penolakan dengan tegas diteriakkan oleh Serbia, yang tidak menerima kemerdekaan sepihak oleh Kosovo.

Kosovo yang merupakan sebuah provinsi di negara bekas Yugoslavia yang pada awalnya berada dibawah kedaulatan Serbia. Namun demikian, Kosovo diberi otonomi khusus oleh pemerintah Serbia atas tekanan-tekanan dari negara-negara Barat dan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Dalam menempuh kemerdekaannya, Kosovo telah melampaui perjalanan panjang dan penuh perjuangan. Kosovo berpenduduk 2,1 juta jiwa, terdiri dari 90 persen etnis Albania yang muslim dan 5,3 persen etnis Serbia yang beragama Katolik Ortodoks, selebih etnis Bosnia dan minoritas lain.¹⁰

Deklarasi kemerdekaan ini merupakan tindakan unilateral karena tidak didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam hal ini Dewan Keamanan. Namun, kemerdekaan Kosovo didukung oleh negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Uni Eropa. Tetapi kemerdekaan Kosoo ini ditolak Rusia, China, beberapa negara Uni Eropa lain, Vietnam dna beberapa negara lainnya. Sedangkan Indonesia belum menentukan sikap, baik menolak maupun mendukung.¹¹

⁸ *Latar Belakang Kosovo.*, Op.Cit

⁹ Christopher J. Borgen, *Kosovo's Declaration of Independence: Self-Determination, Secession and Recognition.* " Dalam <http://www.asil.org/insight/2008/02/insights080229.html> , diakses pada 03 Mei Pukul 22:50 Wib

¹⁰ Muhammad Shoelhi, "Kosovo Merdeka dan Masalahnya," dalam [Http://indonesiainfile.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=52](http://indonesiainfile.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=52) , diakses pada 4 September 2015 pukul. 09.00 Wib

¹¹ *Latarbelakang Kosovo*, dalam <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123644-PK%20VI%20633.8274-Kemerdekaan%20negara-Pendahuluan.pdf> , diakses pada 03 Mei 2015, Pukul 20:08 Wib

Dengan demikian, kemerdekaan sebuah negara dengan didukung dan mendapat pengakuan dari negara lain merupakan hal yang sangat penting, karena pengakuan dari negara lain akan menguatkan kedaulatan negara yang baru merdeka tersebut.

Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia, dimana pengakuan Indonesia juga dibutuhkan untuk mendongkrak pengakuan dari negara-negara muslim lain. Dengan alasan muslim terbesar Indonesia seharusnya segera mengakui kemerdekaan Kosovo yang merupakan negara mayoritas muslim juga. Dengan demikian dukungan dari Indonesia juga diperlukan, dalam hal ini Pemerintahan Kosovo melalui menteri nya pernah meminta langsung dengan Indonesia untuk segera mengakui kemerdekaan Kosovo pada tahun 2014 lalu. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian "***Mengapa Indonesia belum mengakui kemerdekaan Kosovo pada tahun 2008?***"

Kerangka Teori

Kerangka dasar diperlukan untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat sebagai analisa terhadap penelitian. Pada kerangka teori, akan dibahas mengenai Perspektif, Tingkat Analisa, Konsep, dan teori sehingga menunjang penelitian untuk menjawab hipotesa penelitian. Dalam melakukan penelitian ini dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian.

Penulis menggunakan Perspektif Realis, memandang kepentingan nasional adalah sebuah elemen kunci yang membimbing para pengambil kebijakan suatu negara untuk mengambil keputusan atau tindakan atau tindakan terhadap negara lain. Kepentingan nasional merupakan rumusan dari akumulasi

kebutuhan umum suatu bangsa yang mencerminkan pilihan rasional suatu bangsa. Serta dalam perspektif realis memandang bahwa negara sebagai organisme yang hidup, berperan dan bertindak secara rasional dan tindakan-tindakannya berdasarkan kepentingan yang dirumuskan secara rasional.¹²

Asumsi dasar nya dalam perspektif realisme memandang negara sebagai aktor utama dimana negara mewakili unit analisis kunci dalam kajian hubungan antar unit unit ini. Dan juga negara sebagai aktor tunggal, dimana sebuah negara menghadapi dunia luar sebagai sebuah unit terintegrasi untuk mengambil sebuah kebijakan, status ini tidak dapat dimiliki oleh aktor lainnya (aktor non negara). Negara sebagai aktor rasional dalam situasi pengambilan kebijakan luar negeri yang rasional meliputi suatu penetapan tujuan, pertimbangan terhadap seluruh kemungkinan pilihan dalam arti ketersediaan kapabilitas negara.¹³

Dalam kasus ini, Indonesia sebagai negara yang berdaulat sebagai aktor tunggal dan rasional yang berhak mengambil sebuah kebijakan terhadap situasi internasional yang terjadi. Apakah hal itu dapat menguntungkan sebuah negara atau malah sebaliknya merugikan Indonesia. langkah Indonesia menyikapi fenomena kemerdekaan Kosovo dengan belum mengakuan nya merupakan kebijakan Indonesia berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersendiri.

Disisi lain Hubungan Internasional ditandai dengan anarkisme, dimana segala cara akan dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional. Hans J Morgenthau menyatakan bahwa *Super Power* adalah fokus utama hubungan internasional, *Power* adalah alat untuk mencapai

¹² M. Saeri, *Teori Hubungan Internasional sebuah pendekatan paradigmatic..* Dalam Jurnal Transnasional Vol. 03 No.02, Februari 2012. Pekanbaru. Hal 568

¹³ *Ibid.*, Hal 569-570

kepentingan nasional¹⁴. Perspektif Realis memiliki asumsi dasar. Asumsi utama yaitu negara merupakan aktor utama. Dalam hal ini hubungan internasional diidentikkan dengan hubungan antar negara berdaulat

Asumsi yang kedua ialah dari pendekatan politik dan keamanan dengan cara menilai fungsi dan kekuasaan sebagai instrumen politik luar negeri. Asumsi ketiga ialah adanya hirarki yang jelas dari pokok-pokok permasalahan yang mendominasi politik internasional. Dalam penelitian ini yang bertindak ialah negara yang memiliki *power* untuk mencapai kepentingan nasional tersebut melalui kebijakan negara.

Dalam Penelitian untuk menentukan Tingkat analisa maka diperlukan Level analisa yang tepat yang akan membantu memahami objek permasalahan. Sebelum menentukan level analisa, ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, menentukan unit analisis dan kedua unit eksplanasi. Unit analisis merupakan variabel dependen yang hendak dijelaskan. Sedangkan unit eksplanasi merupakan variabel independen yang perilakunya hendak diamati. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Kebijakan Indonesia belum mengakui kemerdekaan Kosovo pada tahun 2008. Menurut Mohtar Mas'ood ada lima kategori menentukan level/tingkat analisa dalam studi hubungan internasional, yakni: Perilaku Individu, Perilaku Kelompok, Negara-Bangsa, Sistem Internasional.¹⁵

Tingkat Analisa yang digunakan dalam penelitian ini ialah Negara. Penelitian ini menggunakan level analisa negara-bangsa. Negara diartikan sebagai integrasi kekuasaan politik, organisasi

kekuasaan, alat dari yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia di dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan di dalam masyarakat.¹⁶ sehingga ketika sebuah negara untuk dapat berinteraksi dengan aktor lain harus mendapat pengakuan secara de-facto dan de jure. Dalam hal ini yang bertugas sebagai pembuat kebijakan ialah negara yang berdaulat Indonesia. Sehingga fokus kajian penelitian ini memusatkan pada alasan kebijakan Indonesia terhadap kosovo.

Teori adalah suatu tatanan intelektual terhadap pokok kajian hubungan internasional sehingga mampu membuat konseprualisasi dan konseptualisasi peristiwa-peristiwa di masa lalu hingga masa kini. Teori berperan membekali peneliti untuk membangun interpretasi terhadap permasalahan yang kompleks dan memberikan cara untuk berpikir kritis, logis, dan integratif.¹⁷

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan Teori politik luar negeri menurut **James N. Rosenau** mengkategorikan faktor-faktor/sumber sumber politik luar negeri suatu negara yaitu:

(1) Sumber sistemik (systemic sources), merupakan sumber yang berasal dari lingkungan eksternal suatu negara. Sumber ini menjelaskan struktur hubungan di antara negara-negara besar, pola-pola aliansi yang terbentuk diantara negara-negara dan faktor situasional eksternal yang dapat berupa isu area atau krisis;

(2) Sumber masyarakat (societal sources), merupakan sumber yang berasal dari lingkungan internal. Sumber ini mencakup faktor kebudayaan dan sejarah,

¹⁴ Hans Morgenthau. *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace*. 1973. New York: Knopf. Hlm 25

¹⁵ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1994). Hal 42-44

¹⁶ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia pustaka, 2008. Hal 91

¹⁷ Scott Burchill, Andrew Linklater. *Teori Teori Hubungan Internasional*. Bandung; Nusa Media. 2008. hal 19

pembangunan ekonomi, struktur sosial dan perubahan opini publik;

(3) Sumber pemerintahan (*governmental sources*), merupakan sumber internal yang menjelaskan tentang pertanggungjawaban politik dan struktur dalam pemerintahan. Pertanggungjawaban politik seperti pemilu, kompetisi partai dan tingkat kemampuan dimana pembuat keputusan dapat secara fleksibel merespon situasi eksternal;

(4) Sumber idiosinkratik (*idiosyncratic sources*), merupakan sumber internal yang melihat nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian elit politik yang mempengaruhi persepsi, kalkulasi, dan perilaku mereka terhadap kebijakan luar negeri. Disini tercakup juga persepsi seorang elit politik tentang keadaan alamiah dari arena internasional dan tujuan nasional yang hendak dicapai¹⁸.

Indonesia merupakan negara besar dengan multi-etnik, hal ini terkadang memicu peperangan dan konflik. Akibatnya, beberapa wilayah yang merasa kurang puas akan pemerintahan Indonesia dan merasa dapat hidup mandiri melakukan pemberontakan atau dinamakan gerakan Separatisme, gerakan-gerakan tersebut sudah lama terjadi di Indonesia, namun belum satu-pun yang terjadi seperti di Kosovo kecuali negara Timor-timor.

Maka dari itu mengingat Indonesia merupakan negara yang juga memiliki konflik gerakan separatisme, seperti RMS dan Papua Merdeka. Indonesia belum mengambil sikap untuk mengakui kemerdekaan Kosovo yang juga dipicu oleh gerakan separatisme etnis Albanian. Adanya kekhawatiran yang dapat memicu terjadinya pemisahan diri dari kelompok separatisme di Indonesia dan diakuinya hal

tersebut di negara-negara lainnya. Berdasarkan teori di atas dapat dilihat dari sumber masyarakat yang juga mencakup tentang sejarah. Adanya faktor sejarah dari Indonesia untuk berhati-hati mengambil sikap dalam mengakui kemerdekaan Kosovo.

Konsep dalam penelitian ini ialah konsep kepentingan nasional, salah satu hal yang paling penting dalam pembahasan tatanan hubungan internasional adalah bahwa konstelasi hubungan yang terjadi antar pelaku-pelaku atau aktor-aktor internasional, baik negara maupun individu atau lembaga yang mengatas namakan negara, senantiasa dilandasi atas pencapaian kepentingan nasional dari setiap negara. Adapun pelaksanaannya oleh pelaku ataupun aktor internasional lainnya dalam interaksinya diimplementasikan dengan berbagai cara, seperti melalui konflik atau kerjasama. Dalam mewujudkan kepentingan nasional, suatu negara berusaha melindungi dan mempertahankan dirinya dari pihak lain yang dapat mengancam kelangsungan dan pemenuhan kebutuhan suatu negara.

Hakekat kepentingan nasional menurut Frankel yaitu:¹⁹

“sebagai keseluruhan nilai yang hendak ditegakkan oleh suatu bangsa. Kepentingan nasional dapat meluluskan aspirasi negara dan dapat dipola secara operasional dalam aplikasinya pada kebijakan-kebijakan yang aktual serta rencana yang dituju”.

Dari penjelasan diatas, memperlihatkan bahwa kepentingan nasional selalu sebagai hal utama dalam pengambilan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara terhadap negara lain, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Berdasarkan kepentingan nasional inilah suatu negara

¹⁸ James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, hal. 21.

¹⁹ Soeprapto, R, *Hubungan Internasional : Sistem, Interaksi dan Prilaku*, Penerbit : PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 144.

merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan dalam hubungan negara lain. Kepentingan nasional merupakan refleksi dari kebutuhan-kebutuhan dalam negeri serta usaha-usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup suatu negara, baik kebutuhan ekonomi, politik, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan.

Indonesia memiliki kepentingan nasional yang mengarah pada keamanan dan keutuhan NKRI. Oleh karena itu, Indonesia berhati-hati dalam mengambil keputusan mengakui Kosovo sebagai negara merdeka.

Isi

Konflik Kosovo & Serbia

Seperti yang telah kita ketahui, konflik selalu saja terjadi di berbagai belahan bumi manapun di dunia. Konflik adalah hubungan antara dua pihak baik individu atau kelompok yang memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan.²⁰ Konflik juga dapat dikatakan sebagai sebuah keadaan yang terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok²¹. Konflik yang sudah pernah terjadi di dunia, dan seperti kita ketahui bersama antara lain adalah, Konflik Rwanda, konflik Bosnia-Herzegovina, konflik Kosovo dan lain-lain.

Konflik di Kosovo terjadi karena adanya usaha menyingkapkan etnis Albania yang merupakan etnis minoritas oleh etnis Serbia yang merupakan etnis mayoritas. Fanatisme dari etnis Serbia muncul tidak lepas dari usaha seorang tokoh Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic yang beretnis Serbia. Presiden Yugoslavia memimpikan sebuah “Serbia Raya”, dan

²⁰ Indro Dwi Haryono, *Intervensi Kemanusiaan dalam Konflik Kosovo*, diunduh <http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind9909d&L=indonews&O=D&F=&S=&P=13907>, diakses pada 2 November 2015 Pukul. 15:09 Wib

²¹ *Ibid.*,

karena etnis Albania yang merupakan etnis minoritas dengan latar belakang mayoritas beragama Islam ingin memisahkan diri dengan etnis Serbia yang mayoritas dengan latar belakang mayoritas beragama Katolik. Slobodan Milosevic dengan segera mengadakan aksi kekerasan dengan kekuatan militer untuk menanggulangi pemisahan diri etnis Albania.

Awal mula pecahnya konflik Kosovo di picu oleh penjajahan yang dilakukan oleh Serbia. Pada tahun 1981, terjadi pengklaiman oleh Serbia atas resentralisasi wilayah Kosovo. Hingga tahun 1989, Kosovo diberi status otonomi khusus di bekas Yugoslavia, namun ketika Serbia dibawah kepemimpinan Slobodan Milosevic status otonomi khusus yang telah diberikan untuk Kosovo diubah, Slobodan Milosevic menghapus status otonomi sehingga daerah itu berada dibawah pengawasan langsung Belgrade yang merupakan ibukota Serbia. Kelompok etnis Albania Kosovo yang menentang keputusan ini kemudian melakukan perlawanan.²²

Kosovo merupakan salah satu provinsi di Selatan Serbia, selama menjadi bagian dari Serbia masyarakat Kosovo merasakan pembantaian massal (genocide) yang dilakukan Serbia di bawah pimpinan Slobodan Milosevic (1989-1999) telah menimbulkan kenangan pahit yang tidak terlupakan, tercatat ratusan ribu warga Kosovo yang mayoritas muslim terbunuh. Dari dua juta penduduk Kosovo, 90 persennya Muslim.²³ Tidak hanya itu pemerintahan Serbia juga melakukan pembersihan etnis (ethnic cleansing) terhadap etnis Albania yang menyebabkan

²² Lita Febriani, *Peran Amerika Serikat di Kosovo pasca kemerdekaan Kosovo*, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Jom FISIP Volume 1 No. 2 – Oktober 2014

²³ Kosovo Belum Sepenuhnya merdeka, dalam hizbut-tahrir.or.id/2008/03/04/kosovo-belum-sepenuhnya-merdeka/ diakses pada tanggal 20 Oktober 2015 Pukul 15:28 Wib

terjadi konflik etnis antara etnis Serbia dan Albania. Konflik tersebut mengakibatkan banyak korban meninggal, cacat fisik, maupun yang hilang.

Semenjak Serbia dipimpin oleh Slobodan Milosevic terjadi kerusuhan etnis, kerusuhan etnis memuncak ketika disahkannya amandemen Undang-Undang Republik Serbia yang menyatakan bahwa otonomi Kosovo berada dibawah pengawasan pemerintah republik Serbia. Tidak setujunya etnik Albania di Kosovo terhadap amandemen UUD Republik Serbia melakukan perlawanan dengan mengandalkan kekuatan bersenjata berpegang teguh pada cita-cita kemerdekaan Republik Kosovo. Dengan adanya keinginan Albania yang berdaulat terpisah dari Serbia maka menimbulkan aksi agresif Slobodan Milosevic.

Aktor yang sangat terlihat pada konflik Serbia dan Kosovo yaitu NATO yang membawa misi penting untuk menjaga perdamaian diwilayah tersebut. Sejak berlangsung perundingan sebelumnya di Rambouillet, diluar kota Paris, AS dan negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO sudah memperingatkan Milosevic, dengan ultimatum jika ia bersikeras tidak menyetujui konsep perdamaian yang ditawarkan, maka negara tersebut (Yugoslavia) akan diserang. Dan kenyataannya Milosevic tetap bersikukuh dengan pendiriannya tidak memperdulikan ancaman tersebut. Akhirnya AS secara sepihak membuat keputusan penyerangan terhadap Serbia tanpa pertimbangan dan persetujuan DK PBB melalui operasi kekuatan gabungan NATO.²⁴

Berdirinya Negara Kosovo

Pembicaraan mengenai status final Kosovo pertama kali dirintis pada tahun 2006 melalui negosiasi di bawah pimpinan

²⁴ *Ibid.*,

khusus Sekjen PBB Martti Ahtisaari, negosiasi berlangsung alot karena masing-masing negara tetap pada pendirian masing-masing, yaitu keinginan Serbia mempertahankan Kosovo di dalam wilayah otonominya dan sebaliknya keinginan Kosovo untuk memisahkan diri dari Serbia. Pada tanggal 26 Maret 2007, kepada Dewan Keamanan PBB, Ahtisaari melaporkan bahwa perundingan mengalami kemacetan. Namun, dia menyampaikan draf penyelesaian status Kosovo yang mengusulkan agar Kosovo diberi kemerdekaan di bawah supervisi sementara Uni Eropa dengan angkatan perang NATO dan polis Eropa.²⁵

Upaya penyelesaian masalah Serbia-Kosovo selanjutnya dilakukan dengan

mengadakan perundingan langsung antara Serbia dan Kosovo, yang berlangsung

selama 120 hari yang difasilitasi Troika Contact Group (Amerika Serikat, Rusia, dan Uni Eropa). Hasil perundingan itu dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB pada 19 Desember 2007. Sejumlah negara mendesak agar status akhir Kosovo segera diputuskan seperti, AS, Inggris, dan Perancis. Sedangkan Rusia, China, Ghana, Kongo, Panama, dan Afrika Selatan menyarankan agar perundingan diteruskan. Namun, Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Barat lain menolak. Perkembangan ini berujung pada deklarasi kemerdekaan Kosovo yang dideklarasikan pada tanggal 17 Februari 2008, kemerdekaan ini didukung Amerika Serikat dan beberapa negara Uni Eropa, tetapi ditolak antara lain oleh Rusia, China, dan beberapa negara Uni Eropa.²⁶

Akan tetapi untuk menyatakan kemerdekaan tidak mudah karena

²⁵ *Peran PBB dalam Usaha Pencapaian Kemerdekaan Kosovo*, diunduh dalam <http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t12378.pdf> diakses pada 30 Oktober 2015 Pukul. 14:00 Wib

²⁶ *Ibid.*,

dibutuhkan perjuangan, keberanian, dan kerja keras agar kemerdekaan dapat terwujud. Demikian halnya dengan apa yang dilakukan Kosovo dengan Para pejuang kemerdekaan Kosovo, yang dikenal sebagai Kosovo Liberation Army (KLA) yaitu Tentara Pembebasan Kosovo yang berjuang untuk melepaskan diri dari Serbia setelah mengalami berbagai konflik yang berkepanjangan. Serbia pernah melakukan penekanan, pengekangan, dan penindasan atas rakyat Kosovo, yang dilakukan oleh pemerintah komunis di masa lalu berlangsung selama puluhan tahun. Hal itu dilakukan Serbia sebagai usaha untuk penyatuan Serbia Raya setelah pecahnya negara-negara yang tergabung dalam Republik Federal Sosialis Yugoslavia.²⁷

Walaupun telah dilakukan berbagai dialog untuk penyelesaian masalah

Serbia-Kosovo tetapi kemerdekaan tidak dapat terlaksana. Melihat kondisi ini maka diperlukan keberanian dan langkah nyata untuk mewujudkan kemerdekaan. Maka pada tanggal 17 Februari 2008 Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan. Deklarasi yang dibacakan oleh Perdana Menteri Hashim Thaci berbunyi, Kosovo akan menjadi negara demokratis yang menghargai hak-hak semua etnis.²⁸ Dengan harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik dan melepaskan diri dari tekanan sebagaimana yang tertuang dalam piagam PBB dan Hukum Internasional. Apalagi negara ini juga secara de facto telah merdeka sejak 10 Juni 1999 karena telah lepas dari kekuasaan Serbia dan berada di bawah pengawasan PBB dengan pemerintahan sementara.

²⁷ *Kosovo Belum Sepenuhnya Merdeka*, dalam hizbut-tahrir.or.id/2008/03/04/kosovo-belum-sepenuhnya-merdeka/ - 69k -, diunduh pada tanggal 20 Oktober 2015.

²⁸ *Kemerdekaan Kosovo*, dalam www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/indonesian/. Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2015 Pukul. 14:09 Wib.

Bagi pemerintah Serbia, tuntutan kemerdekaan Kosovo merupakan gerakan pemisahan diri sehingga harus dicegah menggunakan berbagai cara. Hal tersebut juga dilakukan oleh pemerintahan Kosovo dengan berusaha untuk melepaskan diri dari tekanan dibawah rezim otoriter Serbia. Akibatnya, selama hampir dua dekade pemerintah Serbia disibukkan oleh kegiatan menumpas gerakan pemisahan diri Kosovo. Serbia juga banyak mendapat kecaman dari negara-negara didunia akibat kekejaman kepada penduduknya sendiri yang berbeda ideologi seperti dengan Bosnia dan Kosovo, khususnya etnis Albania yang merupakan penduduk mayoritas di Kosovo, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Barat tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketika warga Kosovo merayakan kemenangan dan merasakan kebahagiaan, hal tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat Serbia terutama kaum minoritas yang tinggal di Kosovo sebanyak 120.000 orang di antara dua juta orang Albania menolak deklarasi kemerdekaan.²⁹ Dan masyarakat Serbia yang berada di Kosovo, mereka melakukan aksi demonstransi yang berbuntut pada aksi brutal juga mendatangi sejumlah kedutaan besar yang mendukung kemerdekaan Kosovo dan menjadi sasaran amuk massa. Demikian halnya dengan pemerintahan Serbia menolak keras kemerdekaan tersebut dan mengancam Kosovo dengan sanksi diplomatik dan ekonomi, namun tidak dengan kekerasan. Serbia akan berusaha untuk menghalangi Kosovo menjadi anggota PBB.

Saat ini, Kosovo menjadi negara keenam yang terbentuk dari bekas federasi Yugoslavia menyusul Slovenia, Kroasia, Masedonia, Bosnia, dan Montenegro serta menjadi negara merdeka ke-193 yang

²⁹ *Minoritas di Kosovo menolak Kemerdekaan di Kosovo*, dalam <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=195055>, diunduh pada tanggal 23 Oktober 2015, Pukul. 11:00 Wib.

merupakan negara termuda di dunia. Dengan adanya kemerdekaan Kosovo menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat internasional, sejumlah negara menyatakan dukungan atas kemerdekaan Kosovo dan sejumlah negara menyatakan menolak karena berbagai alasan, bahkan ada yang belum menentukan sikap dan menunggu keputusan dari Dewan Keamanan PBB. Mengingat kemerdekaan Kosovo tidak mendapat dukungan dari Dewan Keamanan PBB.

Indonesia Belum Mengakui Kemerdekaan Kosovo

Kosovo yang merupakan salah satu daerah yang berada dibawah kekuasaan pemerintahan Serbia yang kemudian melakukan pemberontakan dan tindakan-tindakan radikal untuk melepaskan diri dari negara Serbia. Konflik antara pemerintah Serbia dengan warga Kosovo sudah berjalan sejak lama sehingga puncak dari perjuangan warga Kosovo secara unilateral menyatakan kemerdekaan negaranya pada tahun 2008.

Pendeklarasian kemerdekaan secara unilateral oleh Kosovo merupakan keputusan final untuk mengakhiri konflik yang terjadi terus-menerus terjadi dengan Pemerintahan Serbia. Kosovo melalui dewan parlemennya di Pristina Ibukota Kosovo memproklamasikan kemerdekaan Kosovo lepas dari Serbia, setelah sebelumnya dilakukan voting oleh anggota parlemen Kosovo yang mayoritas beretnis Albania dan hasilnya mayoritas parlemen mendukung upaya deklarasi kemerdekaan tersebut.

Setelah kemerdekaan Kosovo, negara-negara di dunia turut memberikan pandangan melalui dukungan dan penolakan termasuk pilihan tidak memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Kosovo. Beberapa negara yang memiliki kepentingan akan memberikan keputusan sesuai dengan

kepentingan negara tersebut seperti Amerika Serikat dan Rusia yang masing-masing memihak Kosovo dan Serbia. Pada siding darurat Dewan Keamanan PBB di markas besar PBB di Newyork yang membahas tentang kemerdekaan Kosovo. Hasilnya, Indonesia tidak termasuk dibagian negara-negara yang mendukung ataupun menolak. Akan tetapi termasuk negara-negara yang tidak memberikan suara.

Kemerdekaan Kosovo dan pengakuan dari negara-negara lain nyatanya tidak membuat Indonesia untuk ikut memberikan suara pengakuan walaupun Indonesia harusnya menjadi negara yang paling utama dalam memberikan pengakuan, dikarenakan Indonesia merupakan negara muslim terbesar didunia. Indonesia justru menempatkan diri pada posisi “wait and see” terhadap perkembangan negara yang baru berdiri tersebut.

Perihal kemerdekaan Kosovo di Indonesia justru menjadi polemik dalam politik, karena terdapat perbedaan pendapat dari berbagai partai politik. Beberapa parpol seperti Golkar, PPP, PKS, dan PAN mendorong agar pemerintah segera mengambil posisi tegas dengan mendukung kemerdekaan Kosovo. Mereka menganggap dukungan atas Kosovo layak diberikan dengan alasan bahwa Indonesia adalah negara yang menghormati kemerdekaan negara lain. Juga kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sesuai dengan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Sementara dari partai PDI-Perjuangan menganggap bahwa jika Indonesia mendukung kemerdekaan Kosovo, itu sama artinya dengan mendukung terjadinya separatisme. Indonesia masih memiliki sejumlah masalah yang berkaitan dengan separatisme yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Ditambah dengan partai beraliran agama menganggap Indonesia harus mendukung kemerdekaan dikarenakan faktor persamaan

agama sehingga hal ini harus disambut dengan baik.

Perbedaan pendapat dari berbagai parpol juga menempatkan Indonesia dalam posisi dilematis sehingga Indonesia sesuai dengan kepentingannya memilih untuk tidak memberikan suara atau belum mengakui kemerdekaan. Indonesia menganggap perbedaan suara yang terjadi di PBB khususnya di Dewan Keamanan membuat sebenarnya masalah ini memang belum terselesaikan walaupun Kosovo telah mendeklarasikan kemerdekaannya ditambah dengan Serbia yang terus menolak kemerdekaan Kosovo selaku negara yang kedaulatannya terancam.

Indonesia Khawatir atas Pengakuan Terhadap Gerakan Separatisme OPM

Kosovo yang pada awalnya merupakan salah satu propinsi di negara Serbia dan dibawah kewenangan PBB mendeklarasikan diri menjadi salah satu negara merdeka pada tanggal 17 febuari 2008. Ibu kota negara Kosovo Priština (Pristina) dan dengan mayoritas masyarakat beragama Islam (90% dari jumlah penduduk) yang merupakan penduduk dari etnis Albania yang menetap disana pada saat pemerintahan dinasti Turki Usmani. Saat berdirinya Yugoslavia, Kosovo menjadi provinsi dari Serbia dengan status Daerah Otonomi Khusus, namun sejak perang Kosovo dibawah pengawasan PBB sebagai sebuah protektorat.

Banyak negara lain mendukung dan mengakui Kosovo sebagai negara. Indonesia masih tetap pada pendiriannya masih belum mengakuinya sebagai negara. Dapat dikatakan Indonesia tidak mau latah dalam menyingkapinya. Tidak ada yang salah dari sikap Indonesia ini, belajar dari masa lalu, Indonesia paham terhadap posisi agar tidak terulang kembali peristiwa yang sama. Sejenak menengok Kosovo yang pada awalnya merupakan salah satu propinsi di negara Serbia dan

dibawah kewenangan PBB mendeklarasikan diri menjadi salah satu negara merdeka pada tanggal 17 febuari 2008. Ibu kota negara Kosovo Priština (Pristina) dan dengan mayoritas masyarakat beragama Islam (90% dari jumlah penduduk) yang merupakan penduduk dari etnis Albania yang menetap disana pada saat pemerintahan dinasti Turki Usmani.

Saat berdirinya Yugoslavia, Kosovo menjadi provinsi dari Serbia dengan status Daerah Otonomi Khusus, namun sejak perang Kosovo dibawah pengawasan PBB sebagai sebuah protektorat. Negara itu sendiri mendeklarasikan kemerdekaannya secara sepihak dan ditentang oleh Serbia yang bersikeras menolak pengakuan terhadap negara tersebut. Serbia pun di dukung oleh Rusia dan RRC yang sama-sama menolak pengakuan atas kemerdekaan Kosovo sedangkan sepertiga dari negara Eropa dan Amerika serikat telah lebih dahulu mendukung kemerdekaan Kosovo dan total seluruh negara yang mengakui kemerdekaan Kosovo berjumlah 99 negara sampai sekarang ini. Di ASEAN sendiri Indonesia kalah dalam hal mengakui kemerdekaan Kosovo dari Malaysia dan Brunai Darussalam padahal seperti diketahui bahwa Kosovo itu sendiri mayoritas penduduknya adalah muslim.

Pada 17 Februari 2008 Kosovo secara resmi menjadi sebuah negara terpisah dari negara bagian Serbia. Negara itu merdeka setelah berjuang dari kediktatoran Serbia yang mengakibatkan pelanggaran HAM di provinsi itu (sebelumnya). Perjuangan Kosovo, bagi Politisi Indonesia dan komunitas internasional sama dengan gerakan OPM yaitu sebuah gerakan pemisahan diri (separatis) yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip PBB tentang integritas wilayah dan kedaulatan negara.

Papua sejajar dengan Kosovo sebelumnya, sebagai bagian dari wilayah

yang ingin memisahkan diri. Papua maupun Kosovo punya kesamaan latar belakang dalam pandangan dunia internasional terutama blok barat, yaitu Serbia dan Indonesia masing-masing punya histori buruk pelanggaran HAM terhadap rakyatnya. Pada kasus Kosovo, itu alasan utama dukungan perjuangan dan kemerdekaan oleh AS, NATO, Uni Eropa, juga PBB dengan meloloskan resolusi DK PBB 1244 dan penyetujuan proposal Ahitesari. Bagi AS, Uni Eropa, dan sebagian besar anggota PBB, dukungan perjuangan hingga kemerdekaan Kosovo, paling tidak memiliki kepentingan strategis dalam geopolitik sebagai bagian dari bentuk konfrontasi terhadap Rusia dan Serbia. Bila kita membaca arah politik AS di Kosovo, maka kita akan mengerti bahwa, persoalannya karena Serbia keluar dari Uni Eropa dan bersama Rusia melakukan perlawanan terhadap AS di Balkan.

Indonesia dilema dalam memberikan pengakuan terhadap Kosovo Bukan saja karena terdapat perbedaan suara dalam partai-partai di Indonesia antara mengakui kemerdekaan Kosovo dan tidak, tapi juga karena Indonesia mempertimbangkan untung ruginya. Pertama, Indonesia mempertimbangkan hubungan baik dengan Rusia, Serbia, China dalam hal ekonomi, politik maupun strategi; kedua, mendukung kemerdekaan Kosovo bisa saja membuka peluang bagi gerakan "separatis" di Papua; ketiga, mendukung kemerdekaan Kosovo berarti Dubes Serbia di Indonesia di tarik dari Jakarta, sesuai pernyataan Presiden Serbia, Boris Tadic.

Pemerintah Indonesia sendiri sangat berhati-hati mengakui kemerdekaan Kosovo walaupun mendapat desakan dari berbagai kalangan untuk mengakuinya. Kehati-hatian ini sangat beralasan karena melihat historis berdirinya Kosovo yang merupakan tempat pertentangan wilayah antara pemerintah serbia dengan penduduk mayoritas yaitu etnis Albania.

Dalam melakukan perjuangan OPM, bangsa Papua tidak terlepas dari intervensi internasional. Potensi dukungan terhadap perjuangan Papua sama halnya dengan Kosovo, yaitu rakyat Papua punya Ras yang berbeda dengan Indonesia, sama halnya Albania di Kosovo lain dengan Serbia. Papua mayoritas Kristen, dan minoritas dalam NKRI sama dengan Kosovo Mayoritas Muslim dan minoritas dalam Serbia. Potensi yang lain adalah, genodisa di Kosovo sama halnya dengan Papua .Wilayah emas ini yang menyimpan banyak persoalan menjadi perhatian internasional. Pertanyaann yang harus di jawab oleh OPM yaitu akankah negara Papua yang terbentuk itu mandiri secara politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Ketegasan harus diambil sejak dini dalam menempatkan garis politik secara mandiri. Proses rekonsiliasi dan revitalisasi musti dilakukan terus menerus oleh OPM. Proses pendewasaan dalam perjuangan yang ideologis adalah penting dalam menjembatani strategi taktik perlawanan. Bukan karena bangsa Papua dalam berjuang tidak harus membutuhkan intervensi internasional, namun kemandirian untuk tidak dikendalikan dan dijebak dalam bak kepentingan konfrontasi internasional.

Simpulan

Kosovo yang merupakan sebuah provinsi di negara bekas Yugoslavia yang pada awalnya berada dibawah kedaulatan Serbia. Namun demikian, Kosovo diberi otonomi khusus oleh pemerintah Serbia atas tekanan-tekanan dari negara-negara Barat dan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Dalam menempuh kemerdekaannya, Kosovo telah melampaui perjalanan panjang dan penuh perjuangan. Konflik Kosovo dan Serbia tidak lebih dari konflik etnis awalnya. Akan tetapi hal ini kemudian diikuti tindakan radikalisme oleh bangsa Albania

sendiri yang merupakan mayoritas di Kosovo.

Melihat beberapa wilayah di Yugoslavia memerdekakan diri akhirnya Kosovo juga ingin melepaskan diri dari Pemerintahan Serbia, ditenggarai oleh etnis Albanian membuat sebuah referendum yang dianggap ilegal oleh Serbia menyatakan pemisahan diri Kosovo baik dari federasi Yugoslavia maupun Republik Serbia, yang kemudian hal ini menjadi pemicu peperangan berlarut-larut di Kosovo. Walaupun Yugoslavia tidak lagi muncul di tahun 1992, Kosovo tetap berada di bawah Serbia hingga masuknya NATO dengan mandat PBB pada 1999. Sejak saat itu, elite politik Kosovo bertekad untuk segera memerdekakan Kosovo dan berpisah dari Serbia.

Pada tahun 2007, Kosovo mengadakan pemilihan umum dan hal ini di boikot oleh pemerintah Serbia. Setelah itu di tahun 2008 Kosovo melalui dewan parlemennya di Pristina, Kosovo yang merupakan bagian dari wilayah Serbia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Februari 2008 setelah melalui banyak rintangan. Masyarakat Kosovo telah memegang otonomi secara penuh, mereka tidak lagi berada dibawah pemerintahan Serbia. Penolakan dengan tegas diteriakkan oleh Serbia, yang tidak menerima kemerdekaan sepihak oleh Kosovo.

Pendeklarasian Kosovo sebagai negara yang berdaulat dan merdeka menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai negara. terdapat negara-negara baik yang mendukung maupun menolak. Seperti Amerika dan Rusia yang sama-sama memiliki kepentingan di wilayah Kosovo tersebut. Dalam rapat darurat PBB di markas besar PBB di Newyork, Pasca mendeklarasikan kemerdekaan tahun 2008. Kemerdekaan Kosovo menuai banyak tanggapan dari dunia internasional. Penolakan keras atas tindakan ini muncul dari Serbia yang tidak menginginkan

Kosovo hilang dari bagian wilayahnya. Dengan tegas, Serbia menunjukkan keseriusannya untuk mempertahankan Kosovo agar tetap menjadi bagian dari kedaulatannya, Serbia akan melakukan berbagai cara diplomasi untuk menggagalkan kemerdekaan yang diinginkan oleh Kosovo.

Untuk menjadi negara yang berdaulat dan merdeka, setidaknya Kosovo minimal harus mendapatkan persetujuan dan pengakuan dari 100 negara. Setidaknya telah mencapai 69 negara yang mengakui kemerdekaan Kosovo dan terus bertambah setiap tahunnya. Pada tanggal 27 Februari 2010 PBB menetapkan pengakuan yang sah terhadap kemerdekaan Kosovo sebagai sebuah negara-bangsa.

Keputusan ini tidak diikuti oleh negara-negara seperti Rusia, China, Spanyol, dan negara Serbia. Termasuk Indonesia memilih menunjukkan tidak menyikapi kemerdekaan Kosovo. Indonesia tidak menolak kemerdekaan ataupun mengakui kemerdekaan Kosovo. Dalam hal ini Indonesia belum mengambil tindakan oleh karena berbagai pertimbangan Indonesia memilih belum mengakui kemerdekaan Kosovo.

Kemerdekaan Kosovo dan pengakuan dari negara-negara lain nyatanya tidak membuat Indonesia untuk ikut memberikan suara pengakuan walaupun Indonesia harusnya menjadi negara yang paling utama dalam memberikan pengakuan, dikarenakan Indonesia merupakan negara muslim terbesar didunia. Indonesia justru menempatkan diri pada posisi "wait and see" terhadap perkembangan negara yang baru berdiri tersebut.

Perihal kemerdekaan Kosovo di Indonesia justru menjadi polemik dalam politik, karena terdapat perbedaan pendapat dari berbagai partai politik. Beberapa parpol seperti Golkar, PPP, PKS,

dan PAN mendorong agar pemerintah segera mengambil posisi tegas dengan mendukung kemerdekaan Kosovo. Mereka menganggap dukungan atas Kosovo layak diberikan dengan alasan bahwa Indonesia adalah negara yang menghormati kemerdekaan negara lain. Juga kemerdekaan adalah hak segala bangsa, sesuai dengan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Sementara dari partai PDI-Perjuangan menganggap bahwa jika Indonesia mendukung kemerdekaan Kosovo, itu sama artinya dengan mendukung terjadinya separatisme. Indonesia masih memiliki sejumlah masalah yang berkaitan dengan separatisme yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Ditambah dengan partai beraliran agama menganggap Indonesia harus mendukung kemerdekaan dikarenakan faktor persamaan agama sehingga hal ini harus disambut dengan baik.

Perbedaan pendapat dari berbagai parpol juga menempatkan Indonesia dalam posisi dilematis sehingga Indonesia sesuai dengan kepentingannya memilih untuk tidak memberikan suara atau belum mengakui kemerdekaan. Indonesia menganggap perbedaan suara yang terjadi di PBB khususnya di Dewan Keamanan membuat sebenarnya masalah ini memang belum terselesaikan walaupun Kosovo telah mendeklarasikan kemerdekaannya ditambah dengan Serbia yang terus menolak kemerdekaan Kosovo selaku negara yang kedaulatannya terancam.

Banyak negara lain mendukung dan mengakui Kosovo sebagai negara. Indonesia masih tetap pada pendiriannya masih belum mengakuinya sebagai negara. Dapat dikatakan Indonesia tidak mau latah dalam menyingkapihnya. Tidak ada yang salah dari sikap Indonesia ini, belajar dari masa lalu, Indonesia paham terhadap posisi agar tidak terulang kembali peristiwa yang sama. Sejenak menengok Kosovo yang pada awalnya merupakan salah satu propinsi di negara Serbia dan

dibawah kewenangan PBB mendeklarasikan diri menjadi salah satu negara merdeka pada tanggal 17 febuari 2008.

Atas dasar gerakan separatisme yang ada di Indonesia dapat memicu terjadinya konflik yang dapat menyebabkan lepasnya wilayah Indonesia seperti daerah Timor Timur lalu. Untuk itu, dalam mengambil keputusan mengakui negara lain, Indonesia sangat berhati-hati dala mengambil keputusan karena hal ini akan berdampak langsung bagi Indonesia.

Referensi

Jurnal

Anna Yulia Hartati, *Separatisme Dalam Konteks Global (Studi Tentang Eksistensi Republik Maluku Selatan (Rms) Sebagai Gerakan Separatis Indonesia)*, SPEKTRUM Vol. 7, No. 2, Juni 2010 Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional

Nur Dwi Kristiningrum, *United Nation Interim Administration for Kosovo (UNMIK): Pengaruh Organisasi Internasional PBB Terhadap Pembentukan Pemerintah di Kosovo*, Studi Hubungan Internasional-UPN, Global & Policy Vol.2, No.1, Januari-Juni 2014, Diunduh dalam http://eprints.upnjatim.ac.id/6471/1/14_113120__Nur_Dwi_Kristiningrum_-_United_Nation_Interim_Administration_for_Kosovo.pdf diakses pada 13 Oktober 2015, Pukul. 10:00 Wib

Lita Febriani, *Peran Amerika Serikat di Kosovo Pasca Kemerdekaan Kosovo*, Universitas Riau JOM

Fisip Volume 01 No.02, Oktober 2014.

Buku

- Adriana Elisabeth, 2005. *Dimensi Internasional Kasus Papua*, Jakarta; LIPI Press.
- Burchill Scott, 2008. Andrew Linklater. *Teori Teori Hubungan Internasional*. Bandung; Nusa Media
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Hans Morgenthau. *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace*. 1973. New York: Knopf
- I Wayan Parthiana, 1990. *Pengantar Hukum Internassional*, Bandung : Mandar Maju.
- J.G. Starke, 2006. *Introduction to International Law*, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmaja, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskanda, 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung; Refika Aditama.
- James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press
- John RG Djopari, 2003. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Jakarta : Grasindo
- Moleong Lexy J., 2004, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya
- Mas'oad Mochtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan ilmu*. Jakarta: LP3ES
- Mas'oad Mohtar, 1994. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES
- M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: UI-press, 2004
- Perwita, B., dan Yani, Y.M, 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Jakarta: PT. Remaja
- Plano Jack C. dan Roy Olton, 1999. *Kamus Hubungan Internasional*, Jakarta: Putra A. Bardin

Dokumen Resmi

- Ditlanstra, Ditjen Strahan, *Ketahanan Wilayah Papua*, Jakarta, 2006
- Kosovo Declaration of Independence (2008)*, http://www.assembly-kosova.org/common/docs/Dek_Pav_e.pdf, akses tanggal 1 November 2015

Skripsi

- Donny Taufiq, 2009. *Kemerdekaan Negara Kosovo*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Tesis

- Indonesia sebagai mediator dalam konflik Thailand, dalam*

<http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t12226.pdf> diakses pada 9 Desember 2015, Pukul. 13:09 Wib

Internet

Albania Bujuk OKI Internasionalisasi Masalah Kosovo, dalam http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=10977 , diakses pada tanggal 3 Mei 2015 Pukul. 19:07 Wib

Bantuan Ekonomi Amerika Serikat terhadap Kosovo, dalam *Economic Growth*, dalam <http://www.usaid.gov/kosovo/economic-growth> diakses pada 20 Oktober 2015

DK PBB Kembali Beda Pendapat Soal Kosovo, terdapat di <http://www.antara.co.id/arc/2008/2/19/dk-pbb-kembali-beda-pendapat-soal-Kosovo/>, akses tanggal 12 Januari 2016

Indonesia jangan ragu dukung Kosovo, dalam <http://news.detik.com/read/2008/02/19/092140/896130/10/indonesia-jangan-ragu-dukung-kemerdekaan-kosovo> , diakses pada 03 Mei 2015 Pukul 19:00 Wib

Indro Dwi Haryono, *Intervensi Kemanusiaan dalam Konflik Kosovo*, diunduh <http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind9909d&L=indonews&O=D&F=&S=&P=13907>, diakses pada 2 November 2015 Pukul. 15:09 Wib

Kemerdekaan Kosovo, dalam www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/indonesian/. Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2015 Pukul. 14:09 Wib.

Kosovo Belum Sepenuhnya Merdeka, dalam hizbut-tahrir.or.id/2008/03/04/kosovo-belum-sepenuhnya-merdeka/ - 69k -, diunduh pada tanggal 20 Oktober 2015.

Kosovo Profile, dalam <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kv.html> diakses pada 4 November 2015 Pukul. 19:00 Wib

Mencari Masa Depan Kosovo, terdapat di <http://www.suaarapembaruan.com/News/2007/12/19/Editor/edit01.htm>, akses tanggal 12 Januari 2016